

BAB V P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi merupakan dua daerah yang bertetangga dan secara administratif saling berbatasan langsung. Dalam bidang penyediaan air baku, terdapat ketimpangan antara Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi membutuhkan penambahan pasokan sumber air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayahnya. Di sisi lain, sebagian besar sumber air baku yang digunakan Kota Bukittinggi saat ini dan sumber-sumber air baku potensial terdapat di wilayah Kab. Agam. Sumber air baku khususnya yang terdapat di wilayah Kab. Agam yang berdekatan dengan Kota Bukittinggi memiliki kapasitas yang cukup besar. Kapasitas air baku tersebut diperkirakan akan dapat menambah pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Bukittinggi. Jika potensi sumber air baku yang ada di Kab. Agam wilayah Timur dapat dikelola secara baik dan tepat, maka diharapkan dapat melayani pemenuhan kebutuhan air bersih Kota Bukittinggi dan sebagai bentuk konsekuensi, Kab. Agam akan menerima manfaat kompensasi.

Kerjasama antar daerah dinilai dapat mengatasi permasalahan ketimpangan sumber air baku antara Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Kata kunci utama kerjasama menurut Davidson (dalam Setiawan, 2002) adalah kemauan untuk bekerjasama. Tarigan (2009) memperkuat pendapat tersebut dengan menekankan bahwa kerjasama antar daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Kedua belah pihak pernah menginisiasi untuk melakukan kerjasama bidang air minum, namun sampai saat ini kerjasama tersebut belum terwujud.

Setelah dilakukan kajian serta analisis terhadap potensi kerjasama dan dukungan *stakeholder* serta kapasitas objek kerjasama pada kerjasama antar daerah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat hubungan antar daerah Kota Bukittinggi dengan Kab. Agam dalam penyediaan air baku berada pada tingkatan konsultasi. Merujuk kepada sintesa teori tentang tingkatan hubungan kerjasama, konsultasi berada pada tingkatan yang ke-3, dari 6 (enam) tingkatan yang ada. Berdasarkan kondisi ini, dapat diambil gambaran bahwa untuk mencapai tingkatan Kerjasama Penuh yang berada pada level tertinggi, maka terdapat 3 (tiga) tingkatan lagi yang harus dicapai yaitu : Kolaborasi (ke-4), Koordinasi (ke-5) dan akhirnya Kerjasama Penuh (ke-6).
2. Hubungan antar daerah Kota Bukittinggi dengan Kab. Agam dalam penyediaan air baku didominasi oleh hubungan konsultasi. Artinya selama ini antara kedua daerah telah ada upaya-upaya konsultasi terkait kepentingan bersama yaitu penyediaan air baku. Kegiatan konsultasi tersebut dapat dilihat dalam bentuk :
 - a) Upaya kedua daerah yang telah melakukan konsultasi ke lembaga terkait baik lintas vertikal maupun horizontal dalam hal kerjasama antar daerah penyediaan air baku. Kedua daerah pernah melakukan inisiasi kerjasama Tahun 2011 yang difasilitasi oleh Bappenas, serta kontribusi kedua daerah dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemprov Sumatera Barat berupa penyusunan studi kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam Tahun 2014.
 - b) Kedua daerah memandang perlu saling memberitahu tentang kegiatan yang memiliki dampak lintas batas. Dalam beberapa kegiatan peninjauan dan survey sumber air baku di wilayah Kabupaten Agam, telah ada itikad pemerintah Bukittinggi untuk memberi informasi dan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Agam baik tingkat Nagari (desa), kecamatan maupun tingkat kabupaten.
3. Kerjasama penuh atau kerjasama formal antar daerah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dalam penyediaan air belum terwujud. Hal ini disebabkan oleh kurangnya usaha-usaha ke arah terwujudnya kerjasama penuh. Indikasi dari hal tersebut dapat terlihat dari kondisi sebagai berikut :
 - a) Belum terwujudnya manajemen pengelolaan penyediaan air baku yang terkoordinasi

- b) Belum adanya upaya perlindungan secara bersama-sama terhadap sumber-sumber air baku
 - c) Belum adanya perencanaan jangka panjang bersama oleh kedua daerah terkait penyediaan air baku.
4. Dukungan *stakeholder* terhadap kerjasama antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku, dapat disimpulkan sebagai berikut :
- a) Semua *stakeholder* dari Pemerintah Provinsi Sumbar, Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi sangat mendukung kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. Hal ini dapat dilihat dari sikap semua *stakeholder* yang memiliki persepsi yang sama yaitu sangat setuju terhadap faktor-faktor pendukung kerjasama antar daerah.
 - b) *Stakeholder* Prov. Sumbar dan Kota Bukittinggi mempunyai sikap yang sama yaitu mendukung manfaat yang akan diperoleh melalui kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. Sementara dukungan *stakeholder* Kab. Agam terhadap manfaat kerjasama antar daerah tidak sebesar dukungan Bukittinggi dan Sumbar.
 - c) *Stakeholder* Kota Bukittinggi dan Kab. Agam menyadari bahwa terdapat hambatan dalam mewujudkan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku, sedangkan Pemprov Sumbar memandang bahwa hambatan dalam mewujudkan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku merupakan sesuatu wajar (biasa).
 - d) Perbedaan pandangan *stakeholder* antar daerah dalam melihat sisi manfaat dan hambatan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku dipengaruhi hal-hal berikut :
 - *Stakeholder* Kota Bukittinggi dan Pemprov Sumbar memandang bahwa kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku akan membawa manfaat bagi kedua daerah yang akan bekerjasama, terpenuhinya kebutuhan air baku Bukittinggi dan *income* (pendapatan) daerah yang akan diterima Agam sebagai kompensasi.
 - Kab. Agam memandang bahwa manfaat berupa kompensasi yang akan diperoleh pihaknya masih terkendala oleh hambatan kerjasama.

Kendala utama yang dihadapi adalah faktor kepemilikan sumber-sumber air baku yang lebih banyak dikuasai oleh masyarakat. Sumber-sumber air baku yang berupa mata air sebagian besar dimiliki oleh masyarakat atau kelompok masyarakat, seperti kelompok kaum/suku adat, ulayat, maupun dimiliki oleh nagari (desa).

- e) Dukungan *stakeholder* Prov. Sumbar yang sangat besar terhadap kerjasama antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku. Hal ini dapat terlihat dari sikap yang sangat mendukung terhadap manfaat yang akan diperoleh, serta memandang bahwa hambatan dalam kerjasama antar daerah adalah hal yang wajar.
5. Sebagai acuan dalam kebijakan tata ruang, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012–2032 memberi arahan bahwa Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dapat dikembangkan sebagai upaya bersama lintas kabupaten/kota. Disamping itu, Kabupaten dan Kota Bukittinggi termasuk kepada lokasi pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau serta sumber air lainnya, antara lain embung/bendungan, waduk, dan bangunan penampung air lainnya untuk penyediaan air baku alternatif. Arahan tersebut dapat menjadi acuan baik bagi *stakeholder* Pemprov Sumatera Barat maupun Pemerintah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi dalam menindaklanjuti rencana kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku
6. Kriteria prioritas pada kerjasama antar daerah Kota Bukittinggi dengan Kab. Agam dalam penyediaan air baku yaitu :
- I. Pemanfaatan
 - II. Operasional pelayanan
 - III. Pelestarian

Kriteria pemanfaatan menjadi prioritas pertama dalam kerjasama penyediaan air baku. Hal ini dilatarbelakangi oleh tuntutan pemenuhan kebutuhan akan air minum masyarakat yang makin meningkat. Kondisi ini mendorong *stakeholder* untuk menempatkan pemanfaatan sumber air baku sebagai kriteria prioritas.

7. Aspek–aspek prioritas pada kerjasama antar daerah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dalam penyediaan air baku meliputi :

- I. Sistem Pelayanan Air Baku
- II. Legalitas Kerjasama
- III. Peran Serta Masyarakat
- IV. Kuantitas Air baku
- V. Kelembagaan Kerjasama
- VI. Kompensasi Kerjasama
- VII. Konservasi Sumber air Baku
- VIII. Kualitas Air baku

Beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan dari urutan prioritas di atas sebagai berikut :

- a) Sistem pelayanan air baku dan legalitas kerjasama menjadi 2 (dua) aspek prioritas teratas pada kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. Artinya *stakeholder* mempunyai harapan bahwa kerjasama penyediaan air baku dilaksanakan dengan tata kelola yang baik.
- b) Posisi aspek kompensasi kerjasama berada pada prioritas ketiga terbawah. Hal ini merupakan bentuk kehati–hatian *stakeholder* khususnya Kab. Agam dalam menyikapi aspek kompensasi. Kondisi yang melatarbelakangi hal tersebut adalah bahwa sumber–sumber air baku yang berupa mata air sebagian besar merupakan milik masyarakat atau kelompok masyarakat, seperti kelompok kaum/suku adat, ulayat, maupun dimiliki oleh nagari (desa). Sehingga pembahasan aspek kompensasi sangat terkait erat dengan peran serta masyarakat. Hal ini dapat jelas terlihat dari posisi prioritas aspek peran serta masyarakat berada di atas aspek kompensasi. Sehingga, *stakeholder* memandang bahwa pembahasan aspek peran masyarakat perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum pembahasan aspek kompensasi.
- c) Di sisi lain, aspek kuantitas air baku lebih diprioritaskan daripada aspek kualitas. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kriteria pemanfaatan dalam penilaian *stakeholder*. *Stakeholder* menilai aspek kuantitas lebih diprioritaskan daripada kualitas air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang makin meningkat baik kebutuhan Kota Bukittinggi maupun Kab. Agam.

8. Wilayah perbatasan Kabupaten Agam dengan Kota Bukittinggi memiliki potensi sumber air baku yang cukup banyak. Pada kawasan yang tersebar pada 10 wilayah kecamatan di Kabupaten Agam ini, terdapat 171 titik lokasi sumber air baku, dengan total debit 52.735,84 ltr/dtk. Penilaian sumber air baku potensial dipilih dengan pertimbangan kriteria jarak, beda tinggi (elevasi), debit, kualitas dan pemakaian sumber air saat ini. Sumber–sumber air baku yang dialokasikan untuk objek kerjasama antar daerah sebanyak 23 lokasi yang tersebar pada 5 (lima) wilayah kecamatan di Kabupaten Agam. Ketersediaan air sumber air baku objek kerjasama dengan debit sebesar 3.836,00 ltr/dtk.
9. Potensi pemenuhan kebutuhan air minum disimpulkan sebagai berikut :
 - a) Dalam kerjasama antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku, aspek pemerataan dan standarisasi pelayanan perlu mendapat perhatian. Pemanfaatan sumber air untuk pelayanan daerah harus tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat di lingkungan sumber air untuk mendapatkan layanan air bersih. Pemerataan pelayanan juga akan menciptakan efisiensi dan standarisasi pelayanan penyediaan air baku pada kedua daerah. Pemerataan dan standarisasi pelayanan mencakup wilayah Kota Bukittinggi dan 10 (sepuluh) wilayah kecamatan di Kab. Agam yang berdekatan dengan kota Bukittinggi.
 - b) Debit ketersediaan pada sumber–sumber air baku objek kerjasama sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan air minum Kota Bukittinggi, baik kebutuhan saat ini maupun proyeksi kebutuhan 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Kebutuhan pada awal perencanaan (2016) sebesar 186,44 ltr/dtk dan proyeksi kebutuhan Tahun 2036 sebesar 684,50 ltr/dtk dinilai dapat dipenuhi oleh ketersediaan air baku sebesar 3.836,00 ltr/dtk.
 - c) Debit ketersediaan pada sumber–sumber air baku objek kerjasama juga memadai untuk memenuhi total kebutuhan air minum Kota Bukittinggi dan kebutuhan masyarakat pada 10 (sepuluh) wilayah kecamatan di Kabupaten Agam yang berdekatan dengan Kota Bukittinggi. Total kebutuhan Bukittinggi dan Kab. Agam Kebutuhan Tahun 2016 sebesar

572,42 ltr/dtk dan proyeksi kebutuhan Tahun 2036 sebesar 1.869,37 ltr/dtk, dapat dipenuhi oleh ketersediaan air baku sebesar 3.836,00 ltr/dtk.

10. Kerjasama antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku diyakini akan memberikan banyak manfaat kepada kedua daerah yaitu :

- 1) Pemerataan, efisiensi dan standarisasi pelayanan
- 2) Saling Berbagi Keuntungan (*Sharing of Benefit*)
- 3) Bersama Menanggung Biaya (*Sharing of Burden*)
- 4) Kedua Pihak yang Bekerjasama akan Lebih Berdaya
- 5) Menghilangkan Ego Daerah dan Mencegah Konflik Penyediaan Air Baku.
- 6) Masing–masing Pihak lebih Merasakan Keadilan.
- 7) Terjaminnya Keberlanjutan Pengelolaan Penyediaan Air Baku

11. Hambatan–hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kerjasama antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku, sebagai berikut :

- 1) Perbedaan Kepentingan dan Prioritas antar Kedua Daerah dalam Penyediaan Air Baku
- 2) Egoisme Kedaerahan dan Kecenderungan Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah
- 3) Ketidaksiapan dan Keenganan Pemerintah Daerah untuk Terikat Kerjasama Antar Daerah
- 4) Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dalam Inisiasi Kerjasama
- 5) Belum Banyak Cerita Keberhasilan Kerjasama Daerah sebagai *Best Practice*

5.2 Rekomendasi

1. Untuk mewujudkan ke arah kerjasama penuh atau formal antar daerah Kota Bukittinggi dengan Kab. Agam dalam penyediaan air baku berada, maka *stakeholder* di kedua daerah perlu mempertahankan hubungan konsultasi yang telah terjalin baik selama ini, serta meningkatkan :
 - a. Hubungan Kolaborasi, melalui upaya :

- 1) Mengadakan pertemuan berkala baik level staf maupun pimpinan daerah terkait kerjasama penyediaan air baku
- 2) Melaksanakan kerjasama program bersama antar kedua daerah dalam penyediaan air baku
- b. Hubungan Koordinasi, melalui upaya :
 - 1) Meningkatkan koordinasi perencanaan penyediaan air baku baik antara kedua daerah maupun koordinasi yang melibatkan *stakeholder* lainnya
 - 2) Membentuk suatu komite bersama yang berfungsi sebagai lembaga penasehat (*advisory*)
 - 3) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran *stakeholder* dalam melakukan upaya perlindungan terhadap sumber daya air dan lingkungan di daerahnya baik secara bersama maupun sendiri
- c. Memulai Kerjasama Penuh, melalui upaya :
 - 1) Membentuk manajemen bersama dalam pengelolaan penyediaan air baku
 - 4) Menyusun program perencanaan jangka panjang bersama terkait penyediaan dan pengelolaan air baku
 - 5) Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan hendaknya selalu dilandasi sikap saling percaya dan saling menghargai antar kedua pihak yang bekerjasama
2. *Stakeholder* Pemprov Sumatera Barat, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam diharapkan dapat mempertahankan persamaan persepsi yang telah terbangun dalam hal faktor–faktor pendukung, manfaat dan hambatan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku, serta meningkatkan pemahaman dalam rangka mengurangi *gap* (kesenjangan) antar *stakeholder*.
3. Dukungan yang sangat besar dari Pemprov Sumbar terhadap kerjasama antar daerah Kab. Agam dan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku diharapkan dapat diimplementasikan dalam bentuk peran yang lebih aktif dan intensif dalam mendorong dan memfasilitasi semua *stakeholder* untuk dapat mewujudkan kerjasama antar daerah tersebut. Dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air dan PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, Pemprov memiliki kewenangan dalam fungsi fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan lintas kabupaten/kota.

4. Perluasan pelibatan dan peran serta *stakeholder* di luar Pemerintah Kab. Agam, Kota Bukittinggi dan Pemprov Sumbar, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah, baik lintas vertikal maupun horizontal, antara lain : Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Bappenas, BMKG, perguruan tinggi, dan lain–lain.
5. Aspek peran serta masyarakat merupakan salah satu aspek prioritas dalam kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Agam untuk :
 - 1) Melakukan sosialisasi dan pelibatan secara aktif *stakeholder* lokal di wilayah sumber–sumber air baku potensial antara lain pemilik lahan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan kelompok masyarakat pemakai sumber air baku terkait dengan kerjasama antar daerah Kota Bukittinggi dan Kab. Agam dalam penyediaan air baku.
 - 2) Memberikan pemerataan pelayanan, yaitu pemenuhan kebutuhan air minum penduduk Kota Bukittinggi dalam lingkup kerjasama penyediaan air baku dan hak pemenuhan kebutuhan air minum kepada masyarakat yang berada di wilayah sekitar lokasi sumber–sumber air baku.
6. Pelestarian dan kualitas air baku menjadi prioritas terakhir dalam kriteria dan aspek kerjasama penyediaan air baku. Kondisi ini perlu menjadi perhatian yang mendalam bagi *stakeholder* agar kedua aspek tersebut bukan kemudian menjadi hal yang diabaikan, tetapi hanya merupakan pendekatan dalam tahapan perencanaan atau persiapan kerjasama tanpa mengecilkan atau mengenyampingkan substansinya.
7. Pemerintah Kabupaten Agam diharapkan memperdalam dan menyempurnakan data terkait sumber–sumber air baku di wilayahnya, sehingga menjadi informasi akurat dalam lingkup kerjasama antar daerah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dalam penyediaan air baku.
8. Rekomendasi Penelitian Lanjutan
Beberapa topik kajian sebagai rekomendasi untuk dilakukan penelitian lanjutan :

- 1) Kajian Partisipasi Masyarakat pada Kerjasama Antar Daerah Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam dalam Penyediaan Air Baku. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sikap, peran dan partisipasi masyarakat dalam kerjasama antar daerah Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam dalam penyediaan air baku.
- 2) Kajian Tata Kelola dan Ekonomi Kerjasama Antar Daerah Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam dalam Penyediaan Air Baku. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji tata kelola dan menghitung *cost-benefit* kerjasama antar daerah Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam dalam penyediaan air baku.
- 3) Kajian Operasional Penyediaan Air Baku dalam Kerjasama Antar Daerah Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam. Tujuan penelitian adalah untuk merancang dan disain teknis unit produksi, pengolahan dan distribusi air baku.

Daftar Isi

BAB V P E N U T U P	143
5.1 Kesimpulan.....	143
5.2 Rekomendasi.....	149